

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL**
**(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)**

(Skripsi)

Oleh :
Brigitta Avinka Kristanti



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL
(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)**

Oleh

Brigitta Avinka Kristanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan modal intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit digunakan sebagai variabel independen. Pengungkapan modal intelektual digunakan dalam penelitian ini menggunakan *ICD Index* sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Sampel berjumlah 17 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual; Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual; dan Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Selanjutnya secara simultan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Pengungkapan Modal Intelektual

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL**
**(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)**

Oleh

Brigitta Avinka Kristanti

This study aims to analyze the effect of independent commissioners, managerial ownership, and audit committees simultaneously and partially on intellectual capital disclosure. The type of research used is a type of quantitative research. Independent commissioners, managerial ownership, and audit committees are used as independent variables. Disclosure of intellectual capital is used in this study using the ICD Index as the dependent variable. The population in this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. The sample is 17 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used to test the hypothesis is by using multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program. The results of this study indicate that partially independent commissioners have an effect on disclosure of intellectual capital; Managerial ownership has no effect on disclosure of intellectual capital; and the audit committee has no effect on intellectual capital disclosure. Furthermore, simultaneously independent commissioners, managerial ownership, and audit committees influence intellectual capital disclosure.

Keywords: *Independent Commissioners, Managerial Ownership, Audit Committee, and Disclosure of Intellectual Capital*

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL
(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)**

Oleh

Brigitta Avinka Kristanti

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan Akhir : **PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL
(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)**

Nama Mahasiswa : **Brigitta Avinka Kristanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1911031012**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si., Akt

NIP. 19760830 200501 1003

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Ak

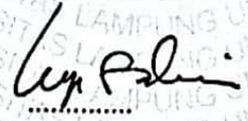
NIP. 19751026 200212 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si., Akt



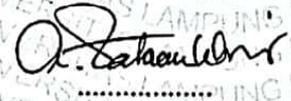
2. Penguji Utama

: Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA



3. Penguji Kedua

: Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigitta Avinka Kristanti

NPM : 1911031012

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 31 Juli 2023



Brigitta Avinka Kristanti

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Brigitta Avinka Kristanti, dilahirkan di Riau pada tanggal 13 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan bernama Yetro Kristanto dan Eka Margiati.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Rotan Mulya, lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Metro Kibang, lulus pada tahun 2016
3. SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, lulus pada tahun 2019

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengembangkan kemampuan akuntansi dengan mengikuti magang di kantor jasa akuntan, dan terlibat langsung dengan proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Tidak hanya itu, penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Unila dan dimanahi sebagai koordinator fakultas selama periode 2021.

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai ucapan syukur yang teramat sangat atas penyertaanNya dan bimbinganNya juga perlindunganNya juga selalu menguatkan penulis selama penulis melakukan penelitian ini. Untuk Bapakku yang selalu mengusahakan apapun yang penulis butuhkan. Terimakasih banyak ya pak, *finnaly* anakmu sarjana. Untuk mamaku yang *always* jadi tempat curhat terutama saat masa bimbingan. Untuk adekku yang selalu *video call* buat nunjukkin keseharian menil si kucing dan jadi salah satu *mood booster* gue pas lagi galau selama drama perskripsian ini. Terimakasih banyak keluargaku untuk cinta, doa dan dukungannya, Tuhan Yesus Memberkati.

Tentunya untuk diriku sendiri, terimakasih ya, kamu hebat bisa ada di titik ini.

Kalau cape istirahat, dan jangan lupa bersyukur!

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan kurniaNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Laporan Akhir berjudul “PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si., Akt selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian laporan akhir ini dengan penuh kesabaran dan perhatian. Terimakasih atas bimbingannya, Pak.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku dosen pembahas 1 yang telah membagikan ilmu dan pengarahan yang sangat berharga dalam penyelesaian proses skripsi ini.
5. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembahas 2 yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Prof. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.

7. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
8. Pemilik NPM 1953051004 telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik waktu, tenaga, maupun pikiran. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini.
9. Sahabat perkuliahan “KMK Bocil” atas kebersamaan selama 4 tahun perkuliahan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, sukses dimanapun berada dan bisa bertemu kembali dilain waktu.
10. Sahabat-sahabatku “Guks Empire”, terimakasih sudah menjadi tempat berbagi suka duka perkuliahan, semoga apa yang menjadi tujuan hidup kita kedepannya selalu dimudahkan dan diberi kelancaran.
11. Bulek Atik, Om Sulis, dan Mbah Uti, terimakasih sudah menjadi tempat terdekat penulis untuk berkeluh kesah selama proses skripsian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Tuhan membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bandarlampung, 31 Juli 2023

Brigitta Avinka Kristanti

DAFTAR ISI

Halaman

PERSEMBAHAN	i
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.4.3 Manfaat Bagi Regulasi	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agensi	9
2.1.2 Modal Intelektual	11
2.1.3 Komponen Modal Intelektual	12
2.1.4 Pengungkapan Modal Intelektual	14
2.1.5 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.6 Struktur <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.7 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Corporate Governance</i>	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	24

2.3.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual	24
2.3.2 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal Intelektual	25
2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual	27
2.4 Kerangka Pemikiran	28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel	30
3.3.1 Variabel Independen	30
3.3.1.1 Komisaris Independen	30
3.3.1.2 Kepemilikan Manajerial	31
3.3.1.3 Komite Audit	31
3.3.2 Variabel Dependen.....	32
3.3.3 Variabel Kontrol.....	33
3.3.3.1 Ukuran Perusahaan	34
3.3.3.2 Leverage	34
3.3.3.3 Profitabilitas.....	35
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	35
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	36
3.4.2.1 Uji Normalitas	36
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	36
3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	36
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	37
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	37
3.5 Pengujian Hipotesis	38
3.5.1 Uji t	38
3.5.2 Uji f	38

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	38
---	----

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian	40
4.2. Analisis Deskriptif	41
4.2.1 Analisis Deskriptif Pengungkapan Modal Intelektual	44
4.3. Analisis Data	47
4.3.1. Uji Asumsi Klasik	47
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	47
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	48
3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas	48
3.4.2.4 Uji Autokorelasi.....	49
4.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.4. Pengujian Hipotesis	52
4.4.1 Uji t	52
4.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	53
4.4.3 Koefisien Determinasi	54
4.5 Pembahasan	54
4.5.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal intelektual	54
4.5.2 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal Intelektual	56
4.5.3 Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual	57
4.5.4 Pengaruh Variabel Kontrol	58

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tingkat <i>Intellectual Capital Disclosure</i> di Indonesia	2
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Penentuan Sampel	40
4.2 Hasil Statistik Deskriptif	41
4.3 Hasil Statistik Deskriptif Pengungkapan Modal Intelektual.....	45
4.4 Hasil Uji Normalitas	47
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas	49
4.7 Hasil Uji Autokorelasi	50
4.8 Hasil Analisis Regresi	50

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah mendorong munculnya perekonomian baru dibidang pengetahuan maupun bidang teknologi serta merubah bisnis yang semula berdasarkan tenaga kerja menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan (Petty & Guthrie, 2000). Perubahan ini menyebabkan adanya *hidden value* yang diindikasikan sebagai *intangible asset* berupa modal intelektual (*intellectual capital*). Modal intelektual (*Intellectual Capital*) berperan sebagai potensi perusahaan dalam meningkatkan keunggulan daya saing yang sukar ditiru perusahaan lain serta belum tentu dimiliki oleh perusahaan pesaing lainnya.

Sumber daya intelektual dengan segala pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya mampu mengantisipasi dan menyesuaikan segala bentuk ketidakpastian situasi yang dapat mengancam eksistensi perusahaan. Kondisi tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penciptaan laba, *strategic positioning* (pangsa pasar, kepemimpinan, dan reputasi), inovasi teknologi, loyalitas pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas (Wahyu, 2009). Modal intelektual dibagi menjadi tiga elemen utama (Woodcock & Rosalind, 2009), yaitu: *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital*. Jensen & Meckling (1976) dalam *Agency theory* menunjukkan adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yang dapat dijumpai oleh pengungkapan sebagai mekanisme untuk mengontrol kinerja manajer.

Pelaporan modal intelektual sebagai *intangible assets* dari perusahaan sangat penting dalam menjembatani asimetri informasi yang mungkin timbul antara manajer dan pemilik perusahaan (White *et al.*, 2007). Namun, wacana yang sering dihadapi mengenai modal intelektual yaitu bagaimana cara pengukuran dan

penyajian modal intelektual. Di Indonesia terdapat regulasi yaitu PSAK no. 19 (revisi 2009) yang mengatur tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK no. 19 (revisi 2009) aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Akan tetapi, dalam regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan. Dengan demikian, pengungkapan informasi modal intelektual merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela.

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual. Di sisi lain, telah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lainnya seperti *Good Corporate Governance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu, semua perusahaan berusaha melakukan pengungkapan dengan menekankan pada pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan di Indonesia dibandingkan dengan pengungkapan yang tidak diwajibkan seperti modal intelektual sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengungkapan modal intelektual menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis *modern*. Laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya aset tidak berwujud berupa modal intelektual dan besarnya nilai yang diakui. Para akuntan dituntut mencari informasi lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual mulai dari pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Namun, keberadaan pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan belum dapat terpecahkan dengan jelas. Pengukuran yang tepat terhadap modal intelektual perusahaan belum dapat ditetapkan. Sehingga banyak perusahaan yang tidak menerapkan pengungkapan modal intelektual di perusahaannya. Fakta lainnya yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia masih rendah dan kurang menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Rendahnya tingkat *intellectual capital*

disclosure tersebut dapat diketahui dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap berbagai perusahaan di Indonesia:

Tabel 1.1 Tingkat *Intellectual Capital Disclosure* di Indonesia

No	Peneliti	Tingkat ICD	Objek Penelitian
1.	Astuti & Wirama (2016)	43,15%	Seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014
2.	Devi <i>et al.</i> (2017)	35%	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014
3.	Isnalita & Romadhon (2018)	46,91%	Perusahaan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam indeks LQ-45 periode 2012-2013
4.	Widarjo <i>et al.</i> (2020)	43%	Perusahaan yang melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) periode 2000-2014
5.	Fyra Muzdalya <i>et al.</i> (2021)	54%	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020

Sumber: Hasil penelitian dalam berbagai jurnal yang diolah oleh penulis, 2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan kekonsistenan hasil yaitu masih kurangnya perhatian perusahaan dalam pengungkapan informasi mengenai *intellectual capital*. Rendahnya tingkat *intellectual capital disclosure* tersebut disebabkan karena sifat hal tersebut adalah sukarela di Indonesia sehingga perusahaan merasa tidak berkewajiban dan enggan untuk memberikan informasi tentang *intellectual capital* yang dimilikinya (Barokah & Fachrurrozie, 2019). Selain itu, metode yang digunakan dalam mengukur variabel *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) dalam penelitian-penelitian diatas berbeda-beda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Wirama (2016), Isnalita & Romadhon (2018), dan Widarjo *et al.* (2020) menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Bukh, *et.al* (2005). Sedangkan penelitian yang dilakukan Devi *et al.* (2017) menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Singh & Zahn (2007), dan penelitian yang dilakukan oleh Muzdalya *et al.* (2021) menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Ulum (2015). Sehingga pengungkapan modal intelektual dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda pula.

Perusahaan subsektor perbankan dianggap sebagai objek ideal dalam penelitian ini. Menurut Suhendro, *et al.* (2021) perusahaan subsektor perbankan merupakan perusahaan yang paling intensif tingkat modal intelektualnya. Keberhasilan perusahaan perbankan dalam memberi jasa atau layanan kepada pelanggannya sangat bergantung pada kecerdasan intelektual sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kegiatan bisnis dalam perusahaan perbankan yang mengelola dana dalam jumlah besar akan dapat menimbulkan potensi seseorang untuk melakukan kecurangan seperti kasus yang menimpa mantan *teller* PT Bank Riau Kepri yang membobol rekening nasabah senilai Rp, 1,3 Miliar pada tahun 2021 (Bisnis Tempo. 2021). Selain itu, perusahaan perbankan merupakan perusahaan dengan basis teknologi yang rawan dengan tidak kecurangan seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 PT Bank Maybank dimana kepala PT Maybank cabang Cipulir membobol rekening nasabah senilai Rp. 20 Miliar (CNN Indonesia. 2020). Kasus pada perusahaan tersebut dapat dicegah salah satunya dengan mekanisme yang ada dalam struktur *corporate governance*.

Struktur *Corporate Governance* meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Struktur dan mekanisme dalam *Corporate Governance* dapat digunakan untuk memonitor tindakan manajemen perusahaan yang curang. Perusahaan yang menerapkan asas *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnisnya akan lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang tidak hanya sekedar mematuhi peraturan atau Undang-Undang yang ada, tetapi juga informasi yang material dan relevan untuk kepentingan *stakeholder*. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh *stakeholder* yaitu informasi mengenai modal intelektual. *Stakeholder* membutuhkan informasi bagaimana penguasaan pengetahuan atau teknologi yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *Intellectual Capital* menemukan hasil yang beragam. Sari Mujiani, *et al.* (2020) menemukan bahwa variabel kepemilikan asing dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual, disisi lain variabel

komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Wahyuni & Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan variabel konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Indah & Handayani (2017) menyatakan ukuran komite audit, independensi dewan, jumlah rapat dewan komisaris, besaran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfauzhi & Santoso (2015) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil yang berbeda pula ditunjukkan oleh penelitian Zulkarnaen & Mahmud (2013) yang menyatakan susunan dewan komisaris independen, direksi independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *Intellectual Capital*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ulum *et al.* (2016) dan Mujiani *et al.* (2020). Penelitian Ulum *et al.* (2016) terkait pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual yang diproksikan dengan total anggota komite audit, total anggota dewan direksi, dan total anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*. Penelitian Mujiani *et al.* (2020) terkait pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual menunjukkan bahwa komisaris independen kepemilikan asing dan *Leverage* secara berturut-turut berpengaruh negatif, positif, dan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulum *et al.* (2016) dan Mujiani *et al.* (2020) adalah penelitian ini menyajikan pengukuran baru pada variabel komite audit yaitu menggunakan *index* dengan dua komponen, meliputi latarbelakang

pengalaman dan rapat komite audit yang sebelumnya peneliti-peneliti terdahulu hanya menggunakan pengukuran berupa jumlah komite audit saja.

Beragamnya mekanisme *Corporate Governance* yang mempengaruhi pengungkapan *Intellectual Capital* memberikan hasil yang belum konsisten, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan struktur *Corporate Governance* yaitu, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit sebagai variabel independen dan pengungkapan modal intelektual (*Intellectual Capital Disclosure*) sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Sebab ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terbukti memberikan pengaruh positif pada pengungkapan laporan perusahaan (Mujiani, *et al.* 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana struktur *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi pada Perusahaan SubSektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh:

1. Komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.3 Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menyajikan pengukuran baru variabel komite audit yaitu menggunakan *index* dengan dua komponen, meliputi latarbelakang pengalaman dan rapat komite audit yang sebelumnya peneliti-peneliti terdahulu hanya menggunakan pengukuran berupa jumlah komite audit saja. Dengan adanya kebaruaran tersebut, diharapkan dapat melengkapi struktur *Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan modal intelektual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital* perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam menentukan luas

pengungkapan *intellectual capital* perusahaan yang optimal untuk meminimalisir *agency cost* yang muncul.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan luas pengungkapan *intellectual capital* perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Manfaat Bagi Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. Selain itu, dikarenakan pengungkapan modal intelektual merupakan pengungkapan yang masih *voluntary* sehingga perlu adanya aturan yang mewajibkan untuk mengungkapkan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan.

Misalnya untuk kategori *Human Capital* dapat diminta deskripsi kualitatif yang berkaitan dengan keunggulan/kekuatan dari karyawan perusahaan dengan indikator seperti usia rata-rata karyawan perusahaan. Untuk kategori *Structural Capital* misalnya regulator dapat meminta emiten mengungkapkan tentang kekayaan intelektual yang mencakup paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, hak lisensi komersial dan bidang-bidang terkait lainnya. Dan untuk *Customer Capital* regulator dapat meminta perusahaan yang terdaftar di bursa untuk mengungkapkan tentang kebijakan dan program untuk membangun hubungan dengan pelanggan misalnya survei kepuasan pelanggan dan inisiatif yang diambil untuk perbaikan, manajemen keluhan pelanggan, dan berbagai kegiatan atau indikator yang dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan, seperti pengiriman tepat waktu, kenyamanan layanan dan sebagainya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan pembahasan landasan teori yang menjadi dasar bagi pengembangan hipotesis, yaitu teori agensi. Uraian berikutnya adalah modal intelektual, komponen modal intelektual, pengungkapan modal intelektual, *Corporate Governance*, struktur *Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Corporate Governance*, faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Governance*. Pembahasan berikutnya adalah pengembangan hipotesis yang menjelaskan pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer-pemilik (*owner-manager*) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan.

Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai *principal* mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan.

Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2006). Hubungan *agen* dan *principal* antara (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh *principal* melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.

Eisenhardt, (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) terbatas, dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan *principal* akibat adanya keinginan untuk memenuhi tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi *principal*, sehingga muncul masalah keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat meminimumkan konflik keagenan.

Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya *asymmetric information (principal)*. Asimetri antara manajemen (*agen*) dengan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak dan *stakeholder* dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan.

Teori keagenan merupakan teori yang mendasari penelitian tentang pengungkapan modal intelektual. Manajer diwajibkan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada pemegang saham atas usaha yang dijalankan. Sedangkan pemegang saham memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan manajer

melalui laporan keuangan yang disampaikan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen pada dasarnya bertindak memaksimalkan kepentingan sendiri. Tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik kepentingan. Manajer cenderung untuk memfokuskan pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Teori keagenan menggunakan insentif manajemen untuk menjelaskan pengungkapan sukarela. Alfaiz (2013) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka bertindak secara optimal karena mereka tahu bahwa pemegang saham berusaha untuk mengendalikan perilaku mereka melalui kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan pengungkapan perusahaan. Adanya dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela didasarkan pada teori keagenan, yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Agen diharapkan dapat mengungkapkan informasi secara luas, sehingga bisa mengurangi konflik.

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik diperlukan untuk menghindari konflik dan kerugian. Wilson (2008) dalam Purwandari & Wahyu (2011) menjelaskan bahwa pada tataran empiris, teori keagenan kurang memadai untuk diterapkan dalam mengelola perusahaan karena memiliki karakteristik yang dominan yaitu pemisahan kepemilikan dari manajemen dan penggunaan dana pinjaman selain dana dari pemegang saham sehingga suatu mekanisme diperlukan yang dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan kreditur. Mekanisme ini yang dinamakan *good corporate governance*. Struktur dalam *corporate governance* memonitoring perusahaan-perusahaan khususnya pada perusahaan sektor perbankan agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, yaitu dalam melakukan pengungkapan informasi salah satunya informasi modal intelektual. Dengan melakukan pengungkapan informasi modal intelektual maka akan memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan

mengenai bagaimana perusahaan keuangan menggunakan modal intelektualnya dalam mengelola bisnisnya dengan baik dan meminimumkan potensi kecurangan yang ada sehingga tercapai transparansi serta akuntabilitas. Keuntungan yang diperoleh dari pemangku kepentingan yaitu mendapatkan informasi yang relevan, sedangkan pada perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis yang baik dengan pemangku kepentingan sehingga dapat membantu menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.

2.1.2 Modal Intelektual

Kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan modal intelektual menjadi solusi tepat dalam persaingan global. Dengan modal intelektual, perusahaan dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya saing global, kinerja, dan nilai perusahaan. Meskipun penting, modal intelektual merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Hal tersebut terbukti dalam berbagai definisi yang berbeda dari berbagai literatur yang ada.

Menurut Sujana dan Abeysekera (dalam Branco, *et al.* 2010) bahwa modal intelektual merupakan bagian dari aset tidak berwujud. Woodcock dan Rosalind, (2009) menjelaskan bahwa modal intelektual adalah perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan. Sedangkan, menurut Branco, *et al.* (2010) modal intelektual sebagai sumber daya berbasis pengetahuan yang membantu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian, modal intelektual dapat didefinisikan yaitu semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3 Komponen Modal Intelektual

Modal intelektual terdiri dari beberapa komponen yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan dalam menerapkan strateginya. Komponen-komponen modal intelektual terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

2.1.3.1 *Human Capital*

Human capital merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Dalam *human capital* terdapat suatu kekuatan *intellectual capital* yang berasal dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan yaitu karyawan yang kompeten, berkomitmen, termotivasi dalam bekerja dan memiliki loyalitas kepada perusahaan. Mereka adalah inti dari penciptaan kekuatan intelektual yang dapat menghilang ketika mereka sudah tidak bekerja lagi untuk perusahaan (Margaretha & Rakhman, 2006).

Human capital berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertindak dalam setiap situasi dan kondisi seperti kemampuan, pengalaman, pendidikan, motivasi (Cheng *et al*, 2010). Brennan & Connel (2000) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang diukur dengan berfokus pada tenaga kerja mencerminkan human capital dalam pembaharuan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai indeks untuk menghitung kompetensi karyawan, kreativitas dan hasil penjualan dari suatu produk yang dihasilkan. Dengan demikian *human capital* sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan kekuatan pada sumberdaya intelektual dan dapat menunjang keberhasilan perusahaan dalam penciptaan keunggulan bersaing.

2.1.3.2 *Customer Capital*

Customer capital merupakan potensi suatu organisasi yang tidak berwujud dari perusahaan. Definisi dari modal ini telah dikembangkan dengan memasukkan *relational capital* yang merupakan pengetahuan tertanam dalam seluruh hubungan organisasi baik dari pelanggan, kompetisi, pemasok, asosiasi perdagangan atau dari pemerintah (Bontis, 1999). Jadi yang dimaksud *customer capital* adalah hubungan perusahaan dengan pihak-pihak luar atau relasi seperti, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat dimana pihak tersebut yang menerima pelayanan baik dari perusahaan. Sehingga akan mewujudkan hubungan yang harmonis dan tercipta loyalitas yang tinggi dari para relasinya.

2.1.3.3 *Structural Capital*

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan struktur yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis keseluruhan. Misalnya, sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi dan filosofi manajemen (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Menurut Wang dan Chang (2005) *structural capital* memiliki hubungan dengan sistem dan struktur perusahaan yang dapat membantu karyawan untuk mencapai kinerja intelektual maksimal, sehingga kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.

Structural capital merupakan bentuk kekayaan yang nyata bagi perusahaan. Selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan seluruh hasil aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh *human capital*, juga berfungsi sebagai infrastruktur atau penunjang bagi *human capital* untuk menjalankan aktivitas penciptaan nilai bagi perusahaan (Ardiyanto dan Entika, 2012). Bontis, *et al* (2000) mendefinisikan *structural capital* sebagai mekanisme-mekanisme dan struktur organisasi yang dapat membantu dukungan karyawan agar dapat menciptakan kinerja intelektual yang optimal dan juga kinerja bisnis secara keseluruhan. Artinya *structural capital* mencerminkan organisasi dan pelanggan yang mewakili nilai dari hubungan dengan pelanggan, pemasok, asosiasi industri dan pasar.

2.1.4 Pengungkapan Modal Intelektual

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual yaitu mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga biaya modal perusahaan dapat mengalami penurunan. Pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan. Standar akuntansi tidak mengizinkan kapitalisasi untuk investasi modal intelektual, beberapa peraturan dan standar yang telah ditetapkan memberikan rekomendasi bahwa perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi tentang modal intelektual diluar laporan keuangan misalnya pada annual report mereka. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa peningkatan pada pengungkapan informasi mengenai modal intelektual perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam pasar keuangan. Selain itu Zeghal (2015) menyebutkan bahwa pengungkapan modal intelektual berkontribusi pada efisiensi yang sangat besar pada pasar, dan untuk perusahaan hal tersebut berarti alokasi sumber daya yang lebih baik pada pasar keuangan.

Dengan pengungkapan modal intelektual yang semakin luas, maka kepercayaan pemilik maupun pemegang saham kepada manajemen akan meningkat sehingga akan mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Belum adanya standar atau peraturan resmi yang mengatur tentang pengungkapan modal intelektual menyebabkan sulitnya mengidentifikasi item-item apa saja yang merupakan komponen modal intelektual (Priyanti dan Agus, 2015). Sehingga membuat para peneliti terus mengembangkan kerangka kerja atau *framework* untuk mengukur modal intelektual.

2.1.5 Corporate Governance

Menurut Sutedi (2011), definisi *Corporate Governance* seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengertian dan konsep *corporate governance* ini dilandasi dengan teori agensi.

Menurut Waryanto (2010), pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, maka diharapkan dapat meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen sehingga dapat mencegah kerugian di antara kedua belah pihak. Untuk mewujudkan terciptanya *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. RUPS atau pemegang saham, dewan direksi,

dewan komisaris, dan karyawan merupakan organ-organ kunci dalam mewujudkan pelaksanaan *corporate governance* yang baik (Waryanto, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi untuk kepentingan jangka panjang baik bagi para pemegang saham maupun bagi pemangku kepentingan dalam jalannya suatu perusahaan.

2.1.6 Struktur *Corporate Governance*

2.1.6.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau pemegang saham pengendali maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Sari, 2012). Komisaris independen juga merupakan pihak netral yang mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas perusahaan dan mengendalikan perilaku manajer perusahaan (Septiana & Yuyetta, 2013). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ashari & Putra (2016) komisaris independen merupakan orang di luar perusahaan yang dipilih untuk mengawasi kinerja perusahaan yang bekerja secara independen dan bertindak untuk kepentingan perusahaan.

Komisaris independen menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Ada pun yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen menurut penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya.

Tugas komisaris independen antara lain, menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan

pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan. Hal yang tidak kalah penting adalah komisaris independen hendaknya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan dimana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk kepada pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat terlaksana dengan baik.

Komisaris independen menjadi pihak yang netral di perusahaan yang diharapkan mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan menjadi penting karena dalam kenyataannya sering terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen (Istanti, 2009). Dewan komisaris dapat diproksikan dengan membandingkan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan total jumlah dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan (Putri & Yunianto, 2016).

2.1.6.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen. Kepemilikan manajerial yaitu situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan., *et al*, 2007). Menurut Jansen dan Mackling (1976), kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Dengan kata lain kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agen dan prinsip sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham. Pernyataan Jansen dan Mackling, tersebut memiliki arti bahwa besarnya kepemilikan manajerial dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen dan mendorong penyatuan kepentingan kedua belah pihak.

Dengan besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajer cenderung berusaha lebih giat dan meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Manajer berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan dan menurunkan biaya keagenan serta dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan *opportunistic*. Salah satu cara untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut yaitu dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak, termasuk mengenai informasi mengenai *Intellectual Capital*. Kepemilikan manajerial dapat diproksikan dengan jumlah dewan komisaris independen dibanding dengan total anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan (Boediono, 2005).

2.1.6.3 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi.
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- d. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- e. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 dalam peraturan Nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat 21 secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit digunakan sebagai media dalam melakukan koordinasi dengan komite audit untuk melakukan tugas pelaksanaan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian internal.

2.1.7 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik, diantaranya adalah:

2.1.7.1 Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.7.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2.1.7.3 Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

2.1.7.4 Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen untuk melancarkan pelaksanaan asas *good Corporate Governance* (GCG) sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.7.5 Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Corporate Governance*

Menurut Pratiwi (2012:34), terdaftar dua faktor dalam *Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Corporate Governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Corporate Governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2) Faktor Eksternal

Maksud faktor eksternal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Corporate Governance* yang berasal dari luar perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Pelaku dan lingkungan bisnis meliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti *business community* atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, *supplier* dan pelanggan yang menuntut perusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda.
- b. Pemerintah dan regulator
Pemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor.
- c. Investor
Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etika bisnis.
- d. Komunitas Keuangan
Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu itu antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Corporate Governance Structure</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> . (Mujiani, <i>et al.</i> 2020)	Perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100	X1= Komisaris Independen X2= Kepemilikan Asing X3= <i>Leverage</i> Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan kepemilikan asing dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.
2	Implikasi Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> (Anggeline & Novita. 2020)	Seluruh perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016.	X1= Jumlah Dewan Direksi X2= Proporsi Komisaris Independen X3= Konsentrasi Kepemilikan	Jumlah dewan direksi dan Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> . Sedangkan Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> .
3	<i>Corporate Governance</i> sebagai Pemicu Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> pada Perusahaan di Indonesia (Arifah & Styawan. 2019)	Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan penerapan CG yang dilakukan oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG) tahun 2011, 2012	X1= Luas pengungkapan <i>corporate governance</i> (Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit) yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan Y= Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>	<i>Corporate governance</i> (Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IC.

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		dan 2013		
4	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i> (Indah & Handayani. 2017)	Seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.	X1= Independensi Dewan X2= Jumlah Rapat Dewan Komisaris X3= Besaran dewan Direksi X4= Besaran Komite Audit X5= Frekuensi Pertemuan Komite Audit X6= Konsentrasi Kepemilikan Y= <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	Independensi dewan, jumlah rapat dewan komisaris, besaran dewan direksi, besaran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> , sedangkan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> .
5	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia (Ulum, <i>et al.</i> 2016)	Perusahaan publik yang masuk dalam <i>50 biggest market capitalization</i> dari tahun 2007 sampai tahun 2014.	X1= <i>Corporate Governance</i> (total anggota komite audit, total anggota dewan direksi, total anggota dewan komisaris) Y= Pengungkapan Modal Intelektual	<i>Corporate Governance</i> (total anggota komite audit, total anggota dewan direksi, total anggota dewan komisaris) berpengaruh terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i> .
6	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> pada Pengungkapan Modal Intelektual (Wahyuni & Rasmini. 2016)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2013.	X1= Komisaris Independen X2= Konsentrasi Kepemilikan X3= Komite Audit Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan modal intelektual, Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual, Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual.
7	Struktur <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan	Perusahaan Sektor Keuangan yang	X1= Proporsi Komisaris Independen X2= Ukuran	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Intellectual Capital</i> (Studi Empiris pada Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI)</p> <p>(Nurfauzhi & Santoso. 2015)</p>	Terdaftar di BEI	<p>Komite audit</p> <p>X3= Frekuensi Rapat Komite Audit</p> <p>Y= <i>Intellectual Capital Disclosure</i></p>	<p><i>intellectual capital disclosure</i>, Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>intellectual capital disclosur</i>, dan Frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>intellectual capital disclosure</i>.</p>
8	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> sebagai Strategi Menghadapi AEC</p> <p>(Siahaan. 2015)</p>	<p>Perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014 dengan jumlah 105 <i>firm year</i>.</p>	<p>X1= Proporsi Komisaris Independen</p> <p>X2= Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</p> <p>X3= Ukuran Komite Audit</p> <p>X4= Frekuensi Rapat Komite Audit</p> <p>X5= Kepemilikan Institusional</p> <p>X6= Kepemilikan Pemerintah</p> <p>X7= Kepemilikan Asing</p> <p>Y= Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i></p>	<p>Proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i>. Sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i>.</p>
9	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Luas Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i></p> <p>(Zulkarnaen & Mahmud. 2013)</p>	<p>Perusahaan publik yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di BEI</p>	<p>X1= Susunan dewan komisaris independen</p> <p>X2= Direksi independen</p> <p>X3= Komite Audit</p> <p>Y= Luas Pengungkapan Modal Intelektual</p>	<p>Susunan dewan komisaris independen, direksi independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>.</p>
10	<p>Pengaruh Mekanisme</p>	<p>Perusahaan IC Intensive</p>	<p>X1= Ukuran dewan komisaris</p>	<p>Ukuran dewan komisaris,</p>

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> pada Perusahaan IC <i>Intensive</i> (Arifah & Dista. 2012)	yang terdaftar di BEI tahun 2009 dengan mempertimbangkan variable kontrol.	X2= Keindependensian Dewan Komisaris X3= Kesibukan Komisaris Independen X4= Komite Audit Y= Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>	independensi dewan komisaris, dan kesibukan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IC, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pengungkapan IC
11	<i>Effect of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure</i> (Hesniati. 2021)	Perusahaan dalam Indeks Kompas 100	X1= Komposisi komisaris independen X2= Dewan Direksi X3= Rapat audit X4= Komite Audit Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Komposisi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ICD. Sedangkan Dewan Komisaris, rapat Audit, dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap ICD.
12	<i>The Effect of Audit Commite Characteristics on Intellectual Capital Disclosure</i> (Li <i>et.al.</i> 2012)	Perusahaan sektor intensif IC Inggris yang terdaftar penuh di London Stock Exchange (LSE) pada 30 Desember 2005	X1= Karakteristik ukuran Komite Audit X2= Frekuensi pertemuan X3= Konsentrasi Kepemilikan X4= Independensi Komite Audit X5= <i>Financial Expertise</i> Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Karakteristik ukuran Komite Audit, frekuensi rapat, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan IC. Sedangkan independensi Komite Audit dan <i>Financial Expertise</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IC.
13	<i>Is Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure Related? A Sri Lanka Case</i>	291 perusahaan terdaftar di <i>Colombo Stock Exchange</i> (CSE), per	X1= Dewan Direksi X2= Komisaris Independen X3= Rapat Dewan Direksi X4= <i>CEO role</i>	Dewan Direksi, Komisaris Independen, Rapat Dewan Direksi, berpengaruh terhadap pengungkapan IC.

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(Puwanenthiren. 2018)	Februari 2015..	<i>duality</i> Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Sedangkan <i>CEO role duality</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IC.
14	<i>The Effect od Company Characteristics and Corporate Governance on the Practices of Intellectual Capital Disclosure</i> (Isnalita & Fitri. 2018)	Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 pada tahun 2012-2013	X1= <i>Size</i> X2= Profitabilitas X3= <i>Leverage</i> X4= Likuiditas X5= Jenis Industri X6= Ukuran Komite Audit X7= Susunan Dewan Komisaris Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Ukuran komite audit, profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, jenis industri bukanlah faktor yang mampu menjelaskan variasi pengungkapan modal intelektual.
15	<i>Corporate Governance Mechanisms and Intellectual Capital</i> (Tejedo & Romero. 2017)	115 laporan tahunan dari 23 perusahaan Ibex 35 selama lima tahun	X1= Struktur kepemilikan X2= Dewan direksi X3= Pemisahan peran CEO dan <i>chairman roles</i> X4= Ukuran Dewan Direksi Y= Pengungkapan Modal Intelektual	Struktur kepemilikan, dewan direksi, pemisahan peran CEO dan <i>chairman roles</i> , dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan IC.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian. Adapun hipotesis dari permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Hubungan keagenan menurut Jensen & Mecling (1976) merupakan kontrak antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) untuk melakukan jasa sesuai kepentingan *principal*. Timbulnya konflik antara *agent* dan *principal* ketika masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing melalui *hidden action* maupun *hidden information*. Pengungkapan dianggap oleh teori ini sebagai mekanisme yang dapat mengurangi biaya yang dihasilkan dan konflik serta mengontrol kinerja manajer, sehingga manajer didorong untuk mengungkap *voluntary information* seperti *intellectual capital disclosure*. Komisaris independen merupakan mekanisme kontrol, tidak saja untuk meyakinkan perilaku perusahaan terhadap keinginan dari *shareholder*, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder* lain dengan menyediakan lebih banyak informasi terkait aktivitas dan kinerja perusahaan (Haniffa & Cooke, 2005)

Dewan komisaris merupakan suatu bentuk mekanisme pengendalian internal dalam pengambilan keputusan untuk memastikan perilaku dari manajemen konsisten dengan keinginan pemilik perusahaan. Komisaris independen berarti anggota dari dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Haniffa & Cooke (2005) menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan, mereka semakin berperan dalam mempengaruhi pengungkapan lebih luas dalam rangka penciptaan nilai yang relevan dari *intellectual capital* bagi *stakeholder*. Komisaris yang independen diharapkan akan lebih mampu melakukan mekanisme pengawasan yang lebih baik, karena tidak

adanya campur tangan kepentingan manajemen perusahaan. Akhirnya akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nasir (2004) menemukan adanya hubungan yang positif signifikan antara komisaris independen dengan pengungkapan. Fakta empiris menemukan bahwa komisaris independen berhubungan secara positif dengan pengungkapan *structure internal/internal capital* (Cerbioni dan Parbonetti, 2007). Li *et al.*, (2008) juga menemukan hubungan positif signifikan antara komisaris independen dengan *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

2.3.2 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan *et al*, 2007). Pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas perusahaan memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan. Masalah utama keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik antara pemilik saham dan manajer adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan Jensen & Meckling (1976). Dengan kata lain, besarnya kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik serta menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer.

Meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajemen dalam perusahaan digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik antara

principal dan agent. Sebagai pemegang saham, manajer akan termotivasi untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, manajer akan bertindak dengan lebih baik karena, keuntungan yang didapatkan perusahaan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka sebagai pemegang saham.

Kepemilikan saham oleh manajer juga akan membuat keputusan antara pemegang saham dan manajer menjadi searah (Fatmawati, 2016). Muryanti (2016) berpendapat semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajer cenderung berusaha lebih giat karena manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Manajer juga akan termotivasi untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan (konflik keagenan) dan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik.

Besarnya kepemilikan manajerial akan meningkatkan meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham dan manajemen itu sendiri (Aisyah & Sudarno, 2014). Dengan kepemilikan manajerial yang besar maka manajer akan selalu berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan yang akan menimbulkan biaya keagenan yang akan berujung pada kerugian residual. Kerugian residual yang dialami oleh perusahaan akan berdampak pula pada manajer. Sehingga untuk mengurangi konflik tersebut maka manajemen akan melakukan pengungkapan informasi perusahaan lebih luas, termasuk informasi modal intelektual.

Penelitian Aisyah & Sudarno (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan. Haji dan Ghazali (2013) mengemukakan pendapat yang berbeda, perusahaan yang dikelola dan dikendalikan oleh pemilik memiliki kemungkinan besar mempengaruhi pada lebih sedikitnya insentif yang dikeluarkan, maka pengungkapan yang dilakukan akan lebih sedikit (Ghazali, 2007). Hal ini karena pemilik bisa mendapatkan informasi melalui saluran informal (Branco *et al.*, 2010) dalam Haji dan Ghazali

(2013). Oleh karena itu, hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan peranan dari komite audit sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap internal perusahaan, sehingga dengan adanya komite audit pengawasan terhadap aktivitas internal perusahaan akan semakin tinggi. Salah satu tugas dan peranan komite audit adalah melakukan penelaahan laporan keuangan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas internal perusahaan. Komite audit harus memastikan bahwa aktivitas internal perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, serta patuh terhadap hukum yang ada. Salah satu bentuk dari pengawasan internal komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kaidah nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

Karamanou (2005) menyatakan bahwa komite audit yang lebih sering melakukan aktivitas, baik mengadakan pertemuan maupun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan peran dalam memantau proses pelaporan perusahaan secara efektif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 mengatur bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka semakin banyak kesempatan komite audit tersebut untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga komite audit dapat mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk informasi atas pengungkapan *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan.

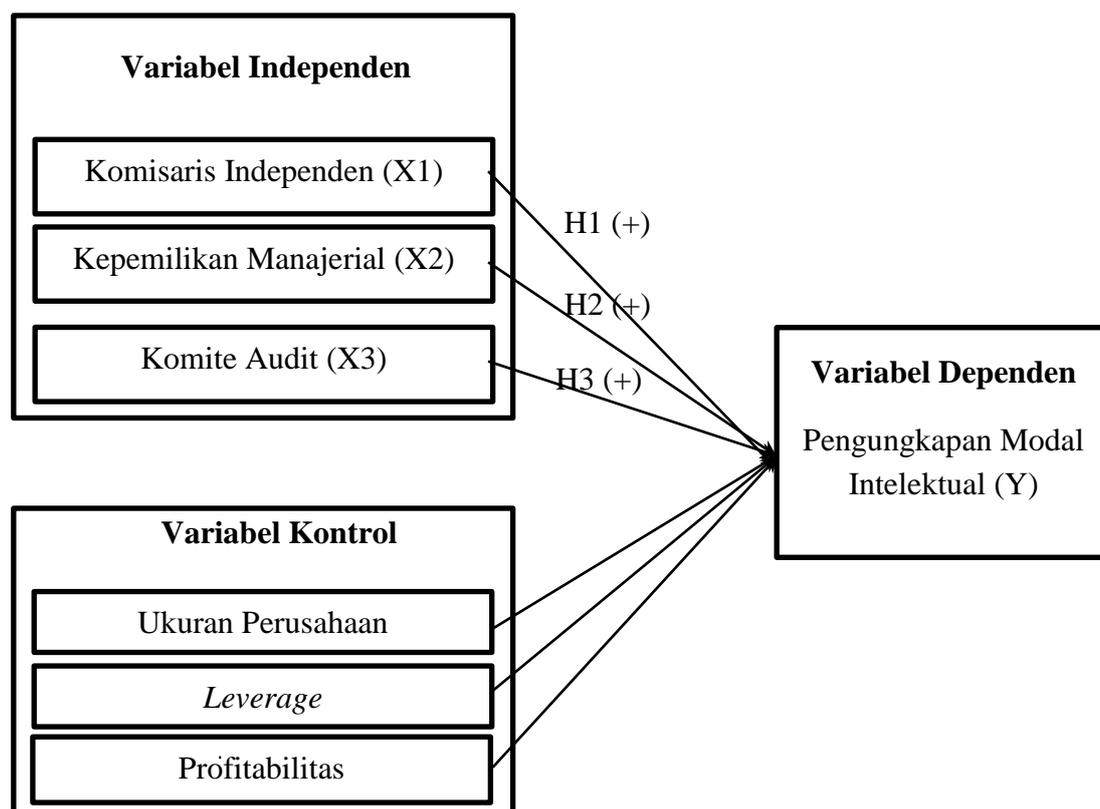
Komite audit dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan yang memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan (pemegang saham dan

pemegang saham potensial) dan manajer, terutama dalam lingkungan pelaporan keuangan dimana mempunyai tingkat informasi yang berlainan. Penelitian yang telah dilakukan Ho dan Wong (2001) menghasilkan kesimpulan hubungan positif antara keberadaan komite audit dan praktik pengungkapan perusahaan. Li *et al.*, (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar cenderung menyediakan pengungkapan *intellectual capital* lebih besar di dalam laporan tahunannya. Jadi, diharapkan komite audit yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti akan mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada objek yang diteliti menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Pendekatan deskriptif menurut (Sugiyono, 2014) digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Data-data tersebut diperoleh dari www.idx.co.id dan www.sahamok.com

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 desember 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dinyatakan dalam rupiah.
- 2) Perusahaan subsektor perbankan yang melakukan IPO setelah tahun pengamatan yaitu tahun 2017 dan perusahaan subsektor perbankan yang *delisting* sebelum tahun pengamatan 2021.
- 3) Perusahaan subsektor perbankan yang mempunyai data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan yaitu tahun 2017-2021.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan tiga macam variabel penelitian, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol.

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel independen adalah:

3.3.2 Komisaris Independen (X1)

Komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam perusahaan diharapkan mampu menjembatani adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak manajer. Komisaris independen sebagai pihak yang netral mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas perusahaan dan mengendalikan perilaku para manajer perusahaan. Komisaris independen merupakan orang-orang diluar perusahaan yang dipilih untuk mengawasi kinerja perusahaan, ini bertujuan agar komisaris independen dapat bekerja secara independen dan bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja dari

manajer dan penilaian terhadap masalah-masalah di perusahaan karena komisaris independen berasal dari luar pihak yang afiliasi. Komisaris independen merupakan mekanisme pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak manajer dengan investor dengan melakukan pengungkapan informasi *intellectual capital*. Komisaris independen diukur dengan presentase antara jumlah dewan komisaris independen dibanding dengan total anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan.

$$KOMIND = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial didefinisikan sebagai persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer eksekutif dan dewan direksi. Manajer eksekutif ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh keputusan didalam perusahaan yang mencerminkan keputusan bisnis. Manajer eksekutif ini meliputi manajer, direksi, dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$MANOWN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

3.5 Komite audit (X3)

Dalam POJK nomor 55 tahun 2015, komite audit merupakan sebuah komite bentukan dewan komisaris dan oleh karena itu bertanggung jawab langsung pada dewan komisaris tersebut. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan operasi perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan. Dalam tugasnya membantu dewan komisaris, sangat dibutuhkan pengalaman dan tingkat pendidikan komite audit, karena semakin banyak

pengalaman dan tingkat pendidikan yang memadai maka akan semakin ahli didalam menjalankan pekerjaannya (Hadi & Kadarni, 2018).

Tingkat pendidikan seorang komite audit diwajibkan mampu memberikan integritas yang tinggi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya yang dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual dalam perusahaan. Tingkat pendidikan komite audit dirasakan berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual karena semakin tinggi jenjang pendidikan anggota komite audit maka semakin baik pola pikir dan tindakan yang diambil oleh anggota komite audit, khususnya dalam pengawasan dan memberikan penilaian yang handal atas laporan keuangan tahunan perusahaan (Febrian, *et al.* 2022). Oleh karena itu, dalam penelitian ini komite audit diukur dengan *index* menggunakan dua komponen yaitu:

1. Apabila komite audit pernah bekerja atau melakukan fungsi pengawasan terhadap pencatatan pada perusahaan subsektor perbankan maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila komite audit tidak pernah bekerja atau tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap pencatatan pada perusahaan subsektor perbankan maka akan diberi skor 0.
2. Apabila komite audit melakukan pertemuan atau rapat yang membahas mengenai pengungkapan maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila komite audit tidak melakukan pertemuan atau rapat yang membahas mengenai pengungkapan maka akan diberi skor 0.

Dengan demikian, nilai maksimal dari komponen *index* untuk pengukuran variabel komite audit diatas adalah:

$$Index\ MAX = \frac{2}{2} = 1$$

3.5.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan yang dinyatakan dengan

ICD *Index* (*Intellectual Capital Disclosure Index*). Metode *content analysis* digunakan untuk mengukur jumlah pengungkapan modal intelektual dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung di dalam kerangka modal intelektual yang dipilih.

Apabila item yang ditentukan diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila item yang ditentukan tidak diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 0. Indeks pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang telah dikembangkan oleh Bukh *et al.* (2005). Peneliti menggunakan indeks pengungkapan tersebut karena item-item modal intelektual yang diungkapkan oleh Bukh *et al.* (2005) lebih lengkap yakni 78 item dibandingkan indeks yang dikembangkan oleh White *et al.* (2007) yang hanya 56 item, Li *et al.* (2008) 61 item, dan Ulum *et al.* (2014) 36 item. Sehingga dianggap lebih mengungkapkan item-item modal intelektual (Priyanti & Agus, 2015).

Indeks pengungkapan modal intelektual yang dikembangkan oleh Bukh *et al.* (2005) juga telah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saendy & Anisykurillah (2015), Fitriani (2010), dan Widarjo *et al.* (2020) dengan hasil penelitian masing-masing sebesar 40%, 38%, dan 43%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pengungkapan modal intelektual yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Indeks pengungkapan modal intelektual Bukh *et al.* (2005) diukur melalui enam dimensi yang meliputi karyawan, konsumen, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan, serta pernyataan strategi yang dijabarkan dalam (Lampiran I). Penilaian ICD *Index* ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perhitungan ICD *Index* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ICD\ Index = \frac{di}{M} \times 100\%$$

Keterangan:

ICD Index = Indeks pengungkapan modal intelektual.

di = Jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan perusahaan.

M = Jumlah maksimum item pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan perusahaan.

3.5.2 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan/dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah:

3.5.2.1 Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar memiliki jumlah pemegang saham yang banyak dan lebih menjadi sorotan di pasar modal, sehingga perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi untuk memenuhi kebutuhan investor, kreditur, dan sebagainya. Menurut *Agency theory*, biaya keagenan akan bertambah seiring dengan bertambahnya proporsi modal eksternal (Jensen dan Meckling, 1976). Sementara penggunaan modal eksternal pada perusahaan besar cenderung semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Dengan melakukan pengungkapan modal intelektual secara lebih luas, asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pemegang saham tentu akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kondisi perusahaan, termasuk tentang bagaimana prospek penciptaan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Dengan berkurangnya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer, maka biaya keagenan yang dikeluarkan untuk memantau kinerja manajer juga berkurang. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya keagenan, perusahaan yang lebih besar tentu akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan modal intelektual secara lebih luas. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{SIZE} = \text{Logaritma natural (total aset)}$$

3.5.2.2 *Leverage*

Leverage digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap hutang yang digunakan dalam membiayai operasi perusahaannya atau aktivitas pembiayaan oleh hutang. Jensen dan Mecking (1976) mengemukakan bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholder* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan-perusahaan yang tingkat utangnya tinggi sehingga menimbulkan *cost agency* yang tinggi. Untuk mengurangi *cost agency* tersebut, manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat *leverage*. *Leverage* dapat diukur dengan cara membagi total hutang dengan total ekuitas. Dengan demikian, *leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

3.5.2.3 *Profitabilitas*

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus ROI (*Return on Investment*). ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi merupakan salah satu hal yang dianggap baik oleh perusahaan. Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007) perusahaan yang menghasilkan laba cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, akan cenderung diungkapkan secara detail oleh perusahaan. Pengungkapan rinci ini biasanya juga didukung dengan pengungkapan informasi sukarela, termasuk *Intellectual Capital* yang diharapkan akan dapat meningkatkan nama baik perusahaan. Rumus ROI akan dijelaskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\textit{Profit after Taxes}}{\textit{Total Assets}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 26. Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang digunakan dalam penelitian (Ikhsan, Arfan dkk, 2014:150).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2018).

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF dan *tolerance* masing-masing

variabel independen. Jika nilai VIF < 10 dan angka *tolerance* $> 0,1$ maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi merupakan ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolute* residual terhadap variabel bebas. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$. Sebaliknya, terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,005$ (Ghozali, 2018).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson, yaitu dengan menghitung nilai d statistik. Nilai d statistik ini dibandingkan dengan nilai d tabel dengan tingkat signifikan 5%. Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson, yaitu dengan menghitung nilai d statistik. Nilai d statistik ini dibandingkan dengan nilai d tabel dengan tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, digunakan metode Durbin-Watson (Dw Test).

- a) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika nilai D-W diatas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Model yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Model dalam penelitian ini adalah:

$$ICD Index = \beta_0 + \beta_1 KOMIND + \beta_2 MANOWN + \beta_3 KOMAUD + \beta_4 SIZE_i + \beta_5 LEV_i + \beta_6 ROA_i + \varepsilon_i$$

Dimana :

ICD Index	: Indeks Pengungkapan Modal Intelektual
KOMIND	: Proporsi Komisaris Independen
MANOWN	: Proporsi Kepemilikan Manajerial
KOMAUD	: Ukuran (jumlah) Komite Audit
SIZE	: Ukuran Perusahaan dihitung dengan logaritma natural total aset (Ln total aset)
LEV	: Rasio <i>Leverage</i> (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
ROA	: <i>Return on Asset</i>
ε_i	: <i>Error term</i>

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji t

Uji t digunakan dalam penelitian untuk melihat apakah variabel independen secara individual mempunyai suatu pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan asumsi variabel bebas lainnya yang konstan. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Jika nilai sig. > 0.05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji f

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi > 0,05 artinya model penelitian tidak layak digunakan.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (Uji R^2) memiliki fungsi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Pada penelitian ini menggunakan R Square yang berkisar antara nol dan satu. Jika nilai adjusted R^2 mendekati satu maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2013).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini **terdukung**.
2. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini **tidak terdukung**.
3. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini **tidak terdukung**.
4. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui variabel kontrol *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan

modal intelektual sedangkan pada variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Pengukuran *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang apabila perusahaan perbankan mengungkapkan item pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunannya maka akan diberi nilai 1 dan apabila tidak mengungkapkan akan diberi nilai 0, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal karena tidak menggunakan pembobotan (*scoring*) pada tiap item pengungkapan modal intelektual.
2. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021, sehingga belum mampu memberikan acuan penelitian secara keseluruhan mengenai pengaruh variabel independen antara lain komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan kemampuan pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yakni komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, terhadap pengungkapan modal intelektual relatif kecil, yakni hanya 13,6%, sehingga menggambarkan masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual.

5.3. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode skor pada masing-masing item pengungkapan modal intelektual sehingga memiliki bobot skor tersendiri pada setiap item pengungkapan. Dengan demikian, metode dengan bobot skor tersebut akan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan peneliti sehingga hasilnya diharapkan akan lebih maksimal, tepat dan akurat.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas, yaitu dengan menggunakan seluruh perusahaan, sehingga dimungkinkan mampu menjadi acuan penelitian secara keseluruhan mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel bebas yang lebih banyak, sehingga memungkinkan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, terhadap pengungkapan modal intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004). Accrual Management And The Independence Of The Boards Of Directors And Audit Committees. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 12, No. 1.
- Abeysekera. (2008). Intellectual capital disclosure trends : Singapore and Sri Lanka. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8.
- Aisyah & Sudarno. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan R&D Terhadap Luas Pengungkapan Modal Intelektual. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1-9.
- Alfaiz, *et al.* (2013). Pengaruh Karakteristik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Melalui Website Perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting* .Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
- Anggeline & Novita. (2020). Implikasi Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 7, No. 1.
- Ardiyanto dan Entika. (2012). Pengaruh Elemen Pembentuk Intellectual Capital terhadap Nilai Pasar dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 2. halaman 1-11.
- Arfan. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Citapustaka Media, Bandung. ISBN 978-602-1317-65-5
- Arifah & Dista. (2012). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *intellectual Capital* pada perusahaan IC *Intensive*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 9 Nomor 2. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Arifah & Styawan. (2019). Corporate Governance Sebagai Pemicu Pengungkapan Intellectual Capital Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol 8, No 1.
- Ashari dan Putra. (2016). Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 3, hlm. 1699-1726.

- Barokah & Fachrurrozie. (2019). Profitability Mediates the Effect of Managerial Ownership, Company Size, and Leverage on the Disclosure of Intellectual Capital. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 8 No. 1, hal 1-8.
- Brennan & Connel. (2000). Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 1 No. 3.
- Bisnis Tempo. (2021). *Eks Pegawai Bank Riau Kepri Membobol Tabungan Nasabah Rp 1,3 Miliar*. [Www.Bisnis.tempo.com](http://www.Bisnis.tempo.com).
www.bisnis.tempo.com
- Boediono. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo
- Bohdannowicz. (2013). The Impact of Ownership Structure on Intellectual Capital Efficiency: Evidence From Polish Emerging Market.
- Bontis. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. *Management Decision*. Vol. 36 No. 2, hal. 14-25.
- Bontis. (1999). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: farming and advancing the state of the field. *Intellectual Journal of Technology Management*. Vol. 18 No. 5-8, hal. 433-62
- Bontis, *et al.* (2000). "Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries,". *Journal of Intellectual Capital*, Vol.1, No.1, pp. 85-100.
- Branco, *et al.* (2010), An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies, *EuroMed. Journal of Business*, Vol. 5 No. 3, pp. 258-278.
- Bruggen, *et al.* (2009). Determinant of Intellectual Capital Disclosure: Evidence from Australia. *Management Decision*. Vol. 47, No. 2, pp. 233-245.
- Bukh, *et al.* (2005). Disclosure of Information on Intellectual Capital in Danish IPO Prospectuses. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 18(6), pp. 713-732.
- Cerbioni & Parbonetti. (2007). Exploring the Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Bio-

Technology Companies. *Paper Presented at the Third International Conference on Corporate Governance*, 16 (940) : 791-826

- Cheng, *et al.* (2010). Invested Resource, Competitive Intellectual Capital, and Corporate Performance, *Journal of Intellectual capital*, 11(4), 433-450
- Christiawan, *et al.* (2007). Kepemilikan Manajerial : Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No.1.
- CNN Indonesia. (2020). *Maybank Buka Suara soal Tabungan Nasabah Rp20M*. Cnnindonesia.Com. www.cnnindonesia.com
- Eisenhardt. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review*. Journal. Vol.14, No.1, 57-74.
- Fatmawati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Modal Intelektual. Universitas Negeri Semarang.
- Fire & Williams. (2003). Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance. *Journal of Intellectual Capital*, 4 (3).
- Ghozali & Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali & Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali. (2007). *Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis dengan Pendekatan Partial Least Square*. SNA XI.
- Guthrie. (2000). Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 1 No. 2. pp. 155-75.
- Haji & Ghazali. (2013). The Quality and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports of Shari'ah Compliant Companies in Malaysia. *Humanomics Journal*, Vol. 29 (No. 1), pp. 24-42.
- Haniffa & Cooke. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 391-430.

- Harahap. (2018). Analisa Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. *e-Proceeding of Management*, Vol.5(1), pp:504.
- Hesniati. (2021). Effect Of Corporate Governance On Intellectual Capital Disclosure. *Business and Accounting Research (IJEBAR)*. Vol 5, No 1.
- Hindun. (2018). Pengaruh karakteristik komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Ho & Wong. (2001). A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139-156.
- Indah & Handayani. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Intellectual Capital Disclosure. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 6, Nomor 3.
- Indriantoro & Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- Isnailita & Fitri. (2018). The Effect of Company Characteristics and Corporate Governance on the Practices of Intellectual Capital Disclosure. *International Business Studies*. Vol 11, No 3.
- Istanti. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Finance Economic* 3:305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum GCG Indonesia*, Jakarta.
- Kuryanto & Syafruddin. (2008). *Pengaruh modal Intelektual terhadap kinerja perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Li, *et al.* (2008). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2):137-159.

- Mahardika. (2014). 'Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap kinerja intellectual capital'. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm. 100-108.
- Margaretha & Rakhman. (2006) Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Market Value dan Financial Performance Perusahaan dengan Metode Value Added Intellectual Coefficient. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 8 No 2, page 199 – 217.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujiani, *et al.* (2020). Pengaruh *Corporate Governance Structure* dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*. *Jurnal Equity UPN Veteran Jakarta*, Vol 23, No 2 (2020), 223-238.
- Muryanti. (2016). Determinan Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Perbankan Tahun 2012-2014. Universitas Negeri Semarang.
- Nasir. (2004). Accrual Management And The Independence Of The Boards Of Directors And Audit Committees. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 12, No. 1
- Nurfauzi & Santoso. (2015). Struktur Corporate Governance Dan Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Vol 5, No 1
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Jakarta : OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta : OJK.
- Petty & Guthrie. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, reporting and management. *Journal of Intellectual Capital*, 1(2), 155-176.
- Pratiwi. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan *Food and Beverage* yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia. *JOM FISIP*, 4(2).

- Priyanti & Agus. (2015). Determinan Pengungkapan Modal Intelektual Berdasarkan Variabel Keuangan dan Non Keuangan. *Accounting Analysis Journal*. Vol 4 No 2 (2015): May 2015
- PSAK No. 19 (revisi 2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Aset Tak Berwujud.
- Putri dan Yuniarto. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Leverage, dan Intensitas Research and Development Terhadap Intellectual Capital Disclosure. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 147, 11-40.
- Purnomo. (2016). Pengaruh Nilai Tambah Modal Intelektual dan Pengungkapan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi*. VOL. 5 No. 2.
- Purwandari & Wahyu. (2011). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Praktik Manajemen Laba (Erning Manajemen). *Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Puwanenthiren. (2018). Is corporate governance and intellectual capital disclosure related a Sri Lankan case. *Journal of Business Studies*, 5(2), 45. <https://doi.org/10.4038/jbs.v5i2.36>
- Saleh. (2009). "Intellectual Capital and Corporate Performance of Technology-Intensive Companies: Malaysian Evidence". *Asian Journal of Business and Accounting*. Vol 1. No. 1. Pp. 113-130.
- Sari. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(1), pp.124-140.
- Septiana dan Yuyetta. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital Pada Prospektus IPO. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2, No. 3. Universitas Diponegoro.
- Siahaan. (2015). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital* Sebagai Strategi Menghadapi AEC. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 12 (2015)

- Singh, & Zahn. (2007). Does intellectual capital disclosure reduce an IPO's cost of capital? The case of underpricing. *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 8 Issue: 3, pp.494-516.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendah. (2012). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas, Produktifitas dan Penilaian Pasar Pada Perusahaan Yang Go Public Di Indonesia Pada Tahun 2005-2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Suhendro, *et al.* (2021). Peran Tipe Informasi Modal Intelektual Sebagai Variabel Moderasi Pada Hubungan Modal Intelektual Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. Vol.8 No.2 Tahun 2021 : hal 133 – 150
- Sujan & Abeysekera. (2007). Intellectual Capital Reporting Practices of the Top Australian Firms. *Australian Accounting Review*, 17 (42), 2007, 71-83.
- Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Sawarjuwono & Kadir. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 5. No. 1. pp 35 – 57.
- Tejedo-Romero, *et al.* (2017). Corporate governance mechanisms and intellectual capital. *Review of Business Management*, 19(65), 394–414.
- Ulum, *et al.* (2014). Intellectual Capital Performance of Indonesian Banking Sector: A Modified VAIC (M-VAIC) Perspective . *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 6, No. 2, hlm: 103-123.
- Ulum. (2015). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ulum. (2017). *Intellctual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi*. Malang: UMM Press
- Undang-undang No. 40. 2007. Tentang Perseroan Terbatas.

- Wang dan Chang. (2005). Intellectual Capital and Performance in Causal Models: Evidence From The Information Technology in Taiwan. *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 6, hal. 222-236
- Wahyu. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan non Keuangan yang Listing di BEI)*. Jurnal Eprints Undip.
- Wahyuni & Rasmini (2016). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* pada pengungkapan Modal Intelektual studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Buletin Studi Ekonom*, Vol 21. No.1. Universitas Udayana, Bali.
- Waryanto. (2010). *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luar Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Jurnal Universitas Diponegoro.
- White, *et al.* (2007). Drivers of Voluntary Intellectual Capital Disclosure in Listed Biotechnology Companies. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8, No.3.
- Wilson. (2008). *How To Implement GCG Effectively*. Cet. 1. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Woodcock & Rosalind. (2009). Intellectual Capital Disclosure by Australian Companies. *Paper Accepted for Presentation at The AFAANZ conference Adelaide, Australia*. July 2009. University of Otago
- Wulandari. (2006). Pengaruh Indikator Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Fokus Ekonomi*, Vol.1, No.2, h.120 – 136
- Zeghal. (2015). Financial statement informativeness and intellectual capital disclosure, *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 13 Iss 1 pp. 66 – 90.
- Zulkarnaen & Mahmud. (2013). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan *Intellectual Capital*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 1.